

**MANAJEMEN KONFLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM KONFLIK
ANTARA MASYARAKAT NEGERI DAN PERUSAHAAN
DI MALUKU TENGAH**

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh:

Berlian Diva Fresenia

20.M1.0114

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

**MANAJEMEN KONFLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM KONFLIK
ANTARA MASYARAKAT NEGERI DAN PERUSAHAAN
DI MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh:

Berlian Diva Fresenia

20.M1.0114

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2024

**CONFLICT MANAGEMENT OF THE CENTRAL MALUKU REGENCY
LOCAL GOVERNMENT IN THE CONFLICT BETWEEN THE LOCAL
COMMUNITY AND COMPANIES IN CENTRAL MALUKU**

Berlian Diva Fresenia

Soegijapranata Catholic University

Semarang

ABSTRACT

The conflict between the local community and companies in Central Maluku can have adverse effects on stakeholders. Therefore, conflict management is a key factor in creating well-being in the community. The Central Maluku Regional Unity and Political Body (Kesbangpol Malteng) of the Local Government plays a significant role as a mediator in conflict management, particularly through mediation. The research method used is qualitative descriptive-explanatory. The results indicate that the Central Maluku Local Government, especially Kesbangpol, implements public relations functions in line with Regulation No. 30 of 2011, particularly in communication management. However, the conflict stages between the local community and companies in Central Maluku do not align with Simon Fisher's proposed conflict stages. In terms of conflict management, the resolution of conflicts in Negeri Kobi, Maneo, and Aketernate with PT Nusa Ina aligns with the concept proposed by Benjamin et al. Conversely, conflicts in Negeri Tananahu, Roho, Kanike, Saunulu, and Kobi Sadar do not align with the same concept. Furthermore, in the mediation stage, the resolution of conflicts between the local community and companies does not align with the proposed mediation stages by Wirawan et al. Therefore, it is crucial to implement conflict management to handle conflicts between the local community and companies in Central Maluku.

Keywords: Conflict Management, Public Relations, Conflict between the Local Community and Companies in Central Maluku.

MANAJEMEN KONFLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM KONFLIK ANTARA MASYARAKAT NEGERI DAN PERUSAHAAN DI MALUKU TENGAH

Berlian Diva Fresenia

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

ABSTRAK

Konflik yang terjadi antara masyarakat negeri dan perusahaan di Maluku Tengah dapat berdampak buruk bagi pemangku kepentingan. Untuk itu, manajemen konflik menjadi salah satu kunci untuk menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Maluku Tengah (Kesbangpol Malteng) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah memiliki signifikansi sebagai penengah dalam manajemen konflik, seperti dengan melakukan mediasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, terutama Kesbangpol, melaksanakan fungsi kehumasan sesuai dengan Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2011, terutama pada fungsi manajemen komunikasi. Sementara itu, tahap konflik antara masyarakat negeri dan perusahaan di Maluku Tengah tidak sesuai dengan konsep tahap konflik yang diajukan oleh Simon Fisher. Kemudian, dalam aspek manajemen konflik, penanganan konflik masyarakat Negeri Kobi, Maneo, dan Aketernate dengan PT Nusa Ina sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Benjamin, dkk. Sebaliknya, konflik di Negeri Tananahu, Roho, Kanike, Saunulu, dan Kobi Sadar tidak sejalan dengan konsep yang sama. Selanjutnya, pada tahap mediasi, penyelesaian konflik antara masyarakat negeri dan perusahaan tidak sesuai dengan konsep tahap mediasi yang diusulkan oleh Wirawan, dkk. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen konflik untuk mengelola konflik antara masyarakat negeri dan perusahaan di Maluku Tengah.

Kata kunci: Manajemen Konflik, Kehumasan, Konflik antara Masyarakat Negeri dan Perusahaan di Maluku Tengah.